

**POTENSI MEDIA FRAMING MENDUKUNG DIPLOMASI PERTAHANAN: STUDI  
KASUS FOTO JURNALISTIK PENENGGELAMAN KAPAL ILLEGAL FISHING DI  
BATAM, TAHUN 2017**

**POTENTIAL OF FRAMING MEDIA FOR SUPPORTING DEFENSE DIPLOMACY:  
CASE STUDY PHOTO JOURNALISM OF ILLEGAL FISHING BOAT SINKING  
IN BATAM, 2017**

Iqro Rinaldi<sup>1</sup>, Sutrimo Sumarlan<sup>2</sup>, Suyono Thamrin<sup>3</sup>

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Unhan

(iqroralaldi@gmail.com)

**Abstrak** -- Media massa merupakan salah satu medium efektif untuk mempublikasikan sebuah informasi, dengan media framing yang dapat digunakan untuk mengarahkan satu sudut pandang dari sebuah isu besar berdasarkan pada fakta yang ada, sedangkan pada praktiknya foto jurnalistik hanya digunakan untuk melengkapi sebuah pemberitaan. Oleh karena itu penulis mencoba untuk melihat potensi lain dalam kaitan antara *media framing* dan foto jurnalistik dengan diplomasi pertahanan yang menghasilkan efek penangkalan (*deterrence effect*), untuk kemudian dapat diaplikasikan sebagai salah satu strategi pertahanan negara. Tulisan ini membahas mengenai analisa konsep diplomasi pertahanan negara sebagai tujuan akhir dari penggunaan *media framing* dan foto jurnalistik. Rumusan masalah yang dihadirkan adalah bagaimanakah pengaplikasian *media framing* dan foto jurnalistik untuk dapat menjadi potensi dalam mendukung diplomasi pertahanan, serta bagaimanakah hubungan antara *media framing* dengan foto jurnalistik penenggelaman kapal *illegal fishing* sebagai potensi terhadap diplomasi pertahanan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan analisis wacana kritis sebagai pisau analisis dalam kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian *media framing* dan foto jurnalistik memiliki potensi untuk mendukung diplomasi pertahanan, selama konsep diplomasi dan pertahanan menjadi konsep dasar dari pembuatan *framing* dan foto jurnalistik itu sendiri. Bagaimana hubungan antara *media framing* dan foto jurnalistik dengan diplomasi pertahanan, dapat tergambar melalui dampak berupa penurunan angka *illegal fishing* sebagai efek penangkalan dari pengaplikasian *media framing* dan foto jurnalistik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pengaplikasian *media framing* dan foto jurnalistik memiliki potensi untuk mendukung diplomasi pertahanan, dengan kajian lebih lanjut yang perlu dilakukan sebagai rekomendasi dari penelitian ini.

**Kata Kunci:** *diplomasi pertahanan, media framing, foto jurnalistik, soft power diplomacy, analisis semiotika, deterrence effect*

---

<sup>1</sup> Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

**Abstract** -- Mass media is one of the effective mediums for publishing information, with framing media that can be used to direct a point of view from a large issue, while still adhering to the facts, while in practice, photojournalism is used to complement a news report. Therefore, researchers try to see another potential in terms of media framing and photojournalism, with defense diplomacy, to produce deterrence effects, which can then be applied as one of the country's defense strategies. This study discusses the analysis of the concept of national defense diplomacy as the ultimate goal of using framing media and photojournalism. The formulation in this research is how the application of media framing and photojournalism can be a potential in supporting defense diplomacy, and how is the relationship between framing media and photojournalism of sinking illegal fishing vessels as a potential for defense diplomacy. The method used is a qualitative research method, using critical discourse analysis as an analysis in condensing data, presenting data, and drawing conclusions. The results showed that the application of media framing and photojournalism had the potential to support defense diplomacy, as long as the concept of diplomacy and defense became the basic concept of making framing and photojournalism itself. How the relationship between media framing and journalistic photos with defense diplomacy can be illustrated through the impact of reducing the number of illegal fishing as a deterrent effect from the application of framing media and journalistic photos. The conclusion of this research is that the application of media framing and photojournalism has the potential to support defense diplomacy, with further studies that need to be done as recommendations from this study.

**Keywords:** *defense diplomacy, media framing, photojournalism, soft power diplomacy, semiotic analysis, deterrence effect*

## Pendahuluan

Diplomasi pertahanan adalah penggunaan kerjasama di masa damai oleh angkatan bersenjata dan infrastruktur terkait sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan.<sup>4</sup> Diplomasi pertahanan dapat dijalankan oleh seorang aktor yang mewakili sebuah negara, baik secara individu maupun sebuah lembaga pemerintahan dengan keterkaitan isu ataupun pembahasan yang tetap mengacu kepada diplomasi dalam ruang lingkup pertahanan. Melihat fungsi dan tujuannya, diplomasi dapat digunakan sebagai instrumen pada bidang

pertahanan salah satunya untuk menjaga ataupun mencegah ancaman yang dapat mengganggu stabilitas wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterlibatan pihak-pihak antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, untuk mencapai kesepakatan dalam melakukan penenggelaman kapal *illegal fishing*, dengan sasaran negara-negara asing yang terlibat dalam praktik merupakan aktor-aktor yang terlibat di dalam proses diplomasi yang digunakan sebagai strategi pertahanan untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayah laut Republik

---

<sup>4</sup>Cottey, Andrew and Foster Anthony. *Reshaping Defence Diplomacy : New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Routledge. 2004. Hal : 6

Indonesia. Selain itu, juga terdapat pihak TNI Angkatan Laut yang ikut mewarnai kebijakan mengenai *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) yang berperan sebagai eksekutor pada proses penenggelaman kapal *illegal fishing*.

Perkembangan teknologi tidak dipungkiri berdampak banyak pada berbagai aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali pada aspek pertahanan. Adanya revolusi industri 4.0 yang merambah pada berbagai bidang termasuk pertahanan, menyebabkan diperlukannya pembaharuan serta inovasi untuk mengimbangi revolusi industri 4.0 yang identik dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dapat serta-merta mengubah paradigma atau tatanan yang selama ini telah dikenal di Indonesia.<sup>5</sup>

Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) cenderung dianggap sebagai *panacea* atau obat mujarab yang dapat menjawab semua tantangan dan masalah pembangunan. Tantangan utama yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia secara umum ada empat elemen pokok, yaitu *connectivity, capacity building, content*, dan *legal framework*. Juga ada faktor-faktor penunjang lainnya

seperti infrastruktur, dukungan sumber-sumber, termasuk investasi sektor swasta, serta keterlibatan pihak bersangkutan seperti akademisi, industri, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).<sup>6</sup> Perkembangan teknologi memegang peranan penting atas perubahan di berbagai sektor dalam elemen-elemen pada sebuah negara, tanpa terkecuali elemen pertahanan. Oleh karena itu, diperlukannya langkah untuk mengimbangi dan melakukan penyesuaian atas perkembangan teknologi itu sendiri dapat menjadi cara untuk mencegah masuknya ancaman.

Diplomasi pertahanan juga memerlukan aspek lain sebagai pendukung dari diplomasi pertahanan itu sendiri, salah satunya melalui media massa. Peran media massa dalam kehidupan sosial menurut berbagai literatur tidak diragukan lagi, yang walau kerap dipandang secara berbeda-beda, namun tidak ada lagi yang menyangkal atas peran yang signifikan dalam masyarakat modern. Penerapan media massa dalam kaitannya pada strategi pertahanan juga digunakan pada berbagai negara, seperti halnya yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup>Kuliah umum di Universitas Pertahanan oleh Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, pada tanggal 13 Maret 2018.

<sup>6</sup>Wibisono, Makarim. Tantangan Diplomasi Multilateral. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia. 2006. Hal: 57.

pihak militer Amerika Serikat yang belajar untuk mengkooptasi media sebagai pembentuk opini publik. Operasi perang dan media diharapkan dapat dibaca oleh siapapun yang ingin memahami bagaimana perang modern dijual kepada opini publik.<sup>7</sup>

Fleksibilitas media massa sebagai sebuah medium untuk menyebarkan informasi kepada khalayak tanpa batasan ruang dan waktu, menjadi salah satu kekuatan yang dimiliki oleh media massa untuk digunakan sebagai salah satu instrumen pada berbagai bidang, tanpa terkecuali bidang pertahanan. Konsep *framing* telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penseleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Analisis *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.<sup>8</sup>

Adanya penggunaan *media framing* bertujuan untuk melakukan penseleksian terhadap sebuah fenomena yang ada sesuai dengan keinginan peneliti, dalam hal ini tentang penenggelaman kapal *illegal fishing* dengan menggunakan foto jurnalistik sebagai instrumen, untuk dikaitkan dengan diplomasi pertahanan sebagai bentuk penanggulangan ancaman dari adanya *illegal fishing* tersebut.

Dengan demikian, *media framing* memiliki suatu potensi untuk dapat mendukung pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang akan berdampak terhadap terganggunya stabilitas baik di dalam negeri maupun kawasan melalui konsep diplomasi pertahanan.

### **Metode Penelitian**

Secara umum desain yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan penelitian terhadap analisis isi (*content analysis*) sebagai pisau analisis. Pembahasan yang dihadirkan mengkaji nilai-nilai serta gagasan mengenai *media framing*, dan analisis semiotika dari konten foto jurnalistik yang terdapat dalam

---

<sup>7</sup>T. Rid. *War and Media Operations : The US Military and the Press from Vietnam to Iraq*. London : Routledge. 2007. Hal: 229.

<sup>8</sup>Alex Sobur. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. Hal: 162.

kebijakan penenggelaman kapal *illegal fishing*. Untuk kemudian merujuk kepada potensi *media framing* yang dapat mendukung konsep diplomasi pertahanan, dengan foto jurnalistik penenggelaman kapal *illegal fishing* di Batam, tahun 2017 sebagai studi kasus. Selain itu, peneliti juga berupaya melihat konteks diplomasi pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia melalui peranan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai aktor yang mewakili negara Indonesia.

Penelitian dilaksanakan di beberapa tempat yakni, Jakarta, Kementerian Pertahanan (Staff Ahli Bidang Keamanan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Satgas 115 dan Fotografer Kementerian Kelautan dan Perikanan), dan Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) ANTARA. Penelitian dilaksanakan dari bulan Oktober Hingga November 2018. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara mendalam dengan teknik penentuan narasumber berupa *purposive snowball sampling*. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, antara sumber dan teori.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (*qualitative*

*content analysis*), yang merupakan perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Dalam menganalisis teks yang berisi data dari wawancara yang dilakukan, peneliti juga menggunakan analisis wacana kritis dari Teun Van Dijk. Analisis ini memiliki dimensi wacana berupa teks, kognisi sosial serta konteks sosial. Dengan demikian, peneliti dapat menghasilkan konsep diplomasi pertahanan melalui data yang didapat mengenai Potensi *Media Framing* Mendukung Diplomasi Pertahanan, dengan Studi Kasus Foto Jurnalistik Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Batam, Tahun 2017.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Penangkapan Ikan Illegal (*Illegal Fishing*)**

Penenggelaman kapal *illegal fishing* dimandatkan di dalam UU Perikanan dengan tujuan untuk melaksanakan penegakan kedaulatan yang tegas dan menciptakan *Deterrence Effect* agar tidak ada lagi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Indonesia. Hal ini juga tertuang di dalam pasal 69 UU Perikanan (31/2004 jo.45/2009) dengan lingkup kewenangan:

- a. Pasal 69 (3): Menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga

melakukan pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan.

b. Pasal 69 (4): Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

**Gambar 1.** Kebijakan Pemberantasan *Illegal Fishing*



Sumber: KKP, 2018

Proses dari penenggelaman kapal *illegal fishing* sendiri diawali dari moratorium dan larangan kapal asing terkait perizinan hingga penggunaan alat pancing yang dapat mengganggu ekosistem di sepanjang wilayah laut Indonesia. Selain itu, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang mempunyai kewenangan untuk melakukan segala tugas berkaitan dengan *illegal fishing*, seperti analisis dan evaluasi dari kapal-kapal yang dianggap melakukan pelanggaran, dengan melewati berbagai proses pertimbangan hukum yang disesuaikan atas pelanggaran dari kapal-

kapal asing tersebut hingga akhirnya diputuskan untuk dijatuhi hukuman penenggelaman kapal atau tidaknya, tergambar jelas dalam proses kebijakan pemberantasan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*. Selain itu, adanya fokus dan penguatan pada penegakan aspek hukum melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Direktorat Jenderal Pajak dan PPATK sebagai pihak-pihak yang mendukung pemberantasan IUU Fishing semakin memperkuat kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.<sup>9</sup>

Keterlibatan TNI Angkatan Laut sebagai eksekutor dari penenggelaman kapal *illegal fishing* berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun tentang TNI Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Hal ini bertujuan untuk menjaga

<sup>9</sup>Yosef. Wawancara. 05-12-2018.

kredibilitas dan citra dari TNI Angkatan Laut dalam setiap penenggelaman kapal yang berkaitan dengan ruang lingkup internasional, sekaligus menjadi pedoman dasar untuk menghindari kesalahpahaman antar instansi yang terkait dalam penegakan hukum dari kebijakan pemberantasan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF).<sup>10</sup>

Dalam setiap penegakan hukum *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF), TNI Angkatan Laut membuat surat kepada Kementerian Luar Negeri yang berisi hasil penyelidikan atau pendataan dari kapal yang telah melakukan *illegal fishing*, untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada negara asal dari kapal yang melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) sehingga penenggelaman kapal yang akan dilakukan nantinya memang telah melewati kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Sejak dijalankannya kebijakan dari *Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing* (IUUF), peningkatan dari ketersediaan ikan ini sendiri tidak lepas dari bagaimana pada akhirnya nelayan Indonesia dapat memanfaatkan sektor perikanan itu secara maksimal, dikarenakan populasi

ikan yang tersedia di wilayah laut Indonesia hanya dapat ditangkap dan diolah untuk kepentingan dalam negeri saja, setelah sebelumnya terdapat campur tangan pihak asing dalam hal penangkapan ikan *illegal fishing*.<sup>12</sup>

**Grafik 1.** Pertumbuhan Ekonomi pada Sektor Perikanan 2010-2017



Sumber: KKP, 2018

Pertumbuhan ekonomi perikanan selalu di atas rata-rata sektor pertanian dan kehutanan, namun kontribusinya terhadap ekonomi nasional masih dikatakan rendah dibandingkan dengan kedua sektor tersebut, yaitu sekitar 2,29% menunjukkan bagaimana sektor perikanan dapat menjadi salah satu sektor yang memberikan sumbangsih besar bagi Indonesia dengan pengelolaan yang maksimal, dimana pertumbuhan ini sendiri semakin terlihat sejak dijalankannya penenggelaman kapal *illegal fishing* sebagai bentuk penegakan hukum dari *Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing* (IUUF).<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Yosef. Wawancara. 05-12-2018.

<sup>11</sup>Leonardus. Wawancara. 22-10-2018.

<sup>12</sup>Yosef. Wawancara. 05-12-2018.

<sup>13</sup>Yosef. Wawancara. 05-12-2018

## Grafik 2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan

Konsumsi Ikan Terus Meningkat  
Indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dalam negeri



Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia 23

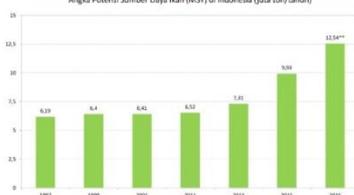
Sumber: KKP, 2018

## Grafik 3. Indikator Populasi Sumber Daya Laut setelah Kebijakan *Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing* (IUUF)

Stock Ikan Meningkat

Indikator pulihnya kesehatan sumber daya laut setelah reformasi kebijakan perikanan tangkap

Angka Potensi Sumber Daya Ikan (MSY) di Indonesia (Juta ton/tahun)



\*\*Bekas estimasi Sumber: Kementerian Kelautan, 2017

Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia 24

Sumber: KKP, 2018

Adanya penegakan hukum dari *Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing* (IUUF) tidak hanya berdampak kepada meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap ikan, namun juga terdapat peningkatan pada ketersediaan (*stock*) dari ikan yang secara tidak langsung merupakan implementasi dari peneggelaman kapal *illegal fishing*, dimana dengan adanya kebijakan peneggelaman tersebut maka populasi ikan yang ada di wilayah laut Republik Indonesia hanya ada untuk dapat

dimanfaatkan dan diolah oleh masyarakat Indonesia sendiri, setelah sebelumnya berkurang drastis akibat ditangkap secara ilegal oleh negara-negara lain.

Di sisi lain, peneggelaman kapal memang memiliki dampak positif yang secara tidak langsung berpengaruh pada kelangsungan sektor kelautan dari Republik Indonesia, namun bagaimana secara teknis peningkatan alutsista juga menjadi efektifitas lain dari kegiatan tersebut. Pada grafik 2, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan akan konsumsi ikan dari masyarakat Indonesia seiring dengan berjalannya kebijakan *Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing* (IUUF). Sedangkan meningkatnya konsumsi ikan dari masyarakat Indonesia juga diikuti dengan peningkatan dari stock ikan seperti yang terlihat dari grafik 3 diatas, yang juga dimulai sejak kebijakan dari *Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing* (IUUF) berjalan pada tahun 2015 hingga tahun 2016.<sup>14</sup>

## **Soft Power Diplomacy dalam Penanganan *Illegal Fishing***

Selain memiliki dampak kepada laju pertumbuhan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

<sup>14</sup>Sunaryo. Wawancara. 27-9-2018

laut Indonesia, kebijakan ini juga telah mengurangi kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing* (IUUF) di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).<sup>15</sup>

Dalam setiap pelaksanaannya, penangkapan pelaku *Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing* (IUUF) memang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan dalam beberapa kasus tidak jarang kapal dari sebuah negara kerap kali menghindar dari upaya penangkapan, Pada realitanya, TNI Angkatan Laut selaku eksekutor penenggelaman kapal selalu menerapkan upaya pengejaran dan investigasi sebelum melakukan penangkapan pada kapal beserta awaknya. Sehingga pada dasarnya tidak ada alasan bagi para kapal dari luar Indonesia untuk takut atau menghindar apabila didekati oleh kapal TNI Angkatan Laut. Pada faktanya setelah kami dekati dan melakukan pemeriksaan, kapal-kapal tersebut memang melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing* (IUUF). Totalitas yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut untuk menggunakan senjata seperti peledak untuk menenggelamkan kapal penangkap ikan tanpa izin (*illegal fishing*) sendiri

dilakukan dengan koordinasi sebelumnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dimana hal ini diharapkan dapat memberi daya tangkal (*deterrence*) yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penangkap *illegal fishing* paling tidak terhadap negara asal kapal yang ditenggelamkan tersebut berasal.<sup>16</sup>

Nilai sebuah foto penenggelaman kapal *illegal fishing*, yang menggunakan bahan peledak secara tidak langsung dapat memberikan efek visual yang lebih menarik sehingga berimplentasi kepada timbulnya daya tangkal (*deterrence effect*), dan berujung pada penurunan dari angka pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) di Indonesia.<sup>17</sup>

### **Diplomasi Publik (*Public Diplomacy*) dalam Penanganan *Illegal, Unreported, Unregulated, Fishing* (IUUF)**

Pelaksanaan penenggelaman kapal selalu melibatkan media, baik media *online*, media elektronik, serta media cetak baik melalui peliputan langsung maupun diseminasi informasi melalui penyebaran siaran pers. Pelibatan media tersebut dimaksudkan agar penenggelaman kapal

---

<sup>15</sup>Yosef. Wawancara. 05-12-2018.

<sup>16</sup>Leonardus. Wawancara. 22-10-2018.

<sup>17</sup>Safri, Regina. Wawancara. 18-12-2018.

diketahui publik baik secara maupun nasional maupun internasional.<sup>18</sup>

Strategi publikasi pada dasarnya tidak hanya dilakukan dalam bentuk foto-foto jurnalistik saja, namun dalam setiap kegiatan Menteri dan kegiatan pejabat dengan ruang lingkup eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), akan ada Tim Dokumentasi Liputan dari tim Humas (Hubungan Masyarakat) yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya yang terdiri dari satu orang fotografer dan satu orang videografer. Hasil foto-foto jurnalistik selanjutnya akan diolah dan disebarluaskan bersama siaran pers (*press release*) ke seluruh rekan media baik itu media cetak, media *online*, maupun media elektronik. Tim Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memproduksi konten kreatif, salah satunya dalam bentuk video dengan kemasan berita dan dipublikasikan melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan News yang diunggah ke YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan News.<sup>19</sup>

Pada prakteknya, diplomasi tidak akan berhasil tanpa perwakilan yang representatif terhadap diplomasi itu sendiri. Publikasi yang dilakukan melalui

suatu medium tertentu dari sebuah proses diplomasi yang terjadi dapat menjadi sebuah kekuatan yang nantinya dapat berdampak pada pihak-pihak yang terlibat dalam diplomasi tersebut. Bagaimana sebuah foto jurnalistik dapat menjadi simbol representatif dari apa yang diberitakan secara tidak langsung menjadi bukti pentingnya kehadiran foto jurnalistik yang dapat diaplikasikan pada berbagai bidang, tanpa terkecuali di bidang diplomasi. Sebagai contoh, pada momen kemerdekaan semua media massa pada saat itu membuat pemberitaan dari kemerdekaan Indonesia dengan visualisasi dari Presiden Soekarno tengah membaca proklamasi yang ditampilkan melalui foto jurnalistik, dan dilengkapi dengan keterangan pada foto tersebut (*caption*) seakan menjadi pernyataan dan penegasan bahwa Indonesia telah mencapai kemerdekaannya kala itu baik pada publik nasional maupun internasional. Jurnalistik dapat digunakan pada berbagai bidang sebagai medium publikasi yang efektif dengan tujuan tertentu, tergantung kepada bagaimana pelaku media tersebut menggunakan jurnalistik itu sendiri.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Yosef. Wawancara. 05-12-2018.

<sup>19</sup>Yosef. Wawancara. 05-12-2018.

<sup>20</sup>Motuloh, Oscar. Wawancara. 24-11-2018.

## Potensi *Media Framing* Mendukung Diplomasi Pertahanan

Penggunaan kekuatan militer pada aspek pertahanan tidak dipungkiri menjadi instrumen utama dalam pengaplikasian secara teknis pada aspek pertahanan itu sendiri, namun seiring perkembangan zaman yang mulai beralih kepada revolusi industri 4.0 dengan keterkaitan erat pada kehadiran teknologi, maka hal tersebut secara tidak langsung dapat membuat adanya instrumen-instrumen baru yang dapat diaplikasikan ke dalam aspek pertahanan. Diperlukannya cara untuk mengatur (*setting*) pada sebuah pemberitaan yang dapat berdampak pada hadirnya stigma atau citra baru di masyarakat terhadap sebuah isu maupun peristiwa dapat menjadi satu cara yang dapat diimplementasikan pada aspek pertahanan.

Bagaimana publikasi dari sebuah pemberitaan dapat membangun atau menciptakan stigma ataupun citra di dalam masyarakat, merupakan salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh media massa. Namun, untuk mendukung efektifitas dari sebuah pemberitaan yang dapat menciptakan sebuah stigma atau citra di masyarakat, juga diperlukan cara

untuk bagaimana mengatur (*setting*) melalui pembingkaihan yang berasal dari pemberitaan itu sendiri.<sup>21</sup>

Layaknya pada ruang lingkup pertahanan, dalam dunia intelijen yang menyangkut kegiatan untuk mencari informasi secara tersembunyi atau biasa disebut dengan dunia mata-mata, *framing* menjadi salah satu komponen yang erat kaitannya dengan intelijen. Pada sebuah pemberitaan, *framing* itu harus didukung komponen-komponen lainnya sebagai validasi bahwa pembingkaihan (*framing*) yang dibuat berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Pada prosesnya, *framing* tidak dapat bekerja sendiri dimana dalam hal ini dibutuhkan berbagai komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain pada pembentukan *framing* yang ditampilkan. *Media framing* juga dapat berjalan secara efektif melalui publikasi yang dilakukan secara terus menerus oleh media itu sendiri. Layaknya pada tindakan penenggelaman kapal *illegal fishing* sebagai penegakan hukum pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF), sebuah *framing* yang dihadirkan seharusnya dapat diimplementasikan melalui publikasi dengan intensitas secara terus menerus melalui medium tertentu

---

<sup>21</sup>Swastanto, Yoedhi. Wawancara. 01-11-2018.

yang ditunjang oleh keterlibatan media massa sebagai lembaga yang memiliki efektifitas dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas.

Selain itu, pembedaan (*framing*) yang dihadirkan dalam sebuah pemberitaan haruslah memiliki sasaran kepada siapakah pembedaan (*framing*) tersebut ditujukan. Untuk menunjang efektifitas dari sebuah media framing, bagaimana intensitas dari publikasi pembedaan (*framing*) tersebut kepada sasaran yang diinginkan dan dilakukan secara terus menerus dapat menjadi suatu elemen penting yang dapat menentukan penyampaian tujuan dan pesan yang terkandung di dalam media framing melalui sebuah pemberitaan.<sup>22</sup>

*Media framing* membutuhkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, salah satunya kementerian pertahanan dan TNI, agar dapat timbul objektifitas dalam penyebaran beritanya, salah satunya melalui foto, agar foto juga dapat ditampilkan sesuai dengan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi. Penggunaan foto dalam sebuah produk jurnalistik yang mengangkat satu permasalahan atau peristiwa untuk kemudian dikaji ke dalam bahasan yang

lebih mengerucut melalui *media framing* memang dapat menjadi efektifitas tersendiri termasuk dalam sektor pertahanan Indonesia. Namun, bagaimana *media framing* ini sendiri dapat menjadi dasar yang sudah seharusnya berjalan dengan publikasi yang dilakukan atau dengan kata lain sesuai dengan fakta yang terjadi saat itu menjadi pertimbangan lain yang tidak boleh dilupakan oleh para pelaku media sendiri.<sup>23</sup>

Keberhasilan diplomasi salah satunya ditentukan oleh penggunaan media masa, dimana hal ini dikarenakan efek penangkalan (*deterrence effect*) yang dimiliki oleh media massa sangatlah kuat. Oleh karena itu, sinergitas dengan media massa haruslah dapat berjalan dengan baik untuk secara tidak langsung dapat menjadi kekuatan psikologis untuk menakuti pihak lawan. Efektifitas media massa yang didukung dengan pembedaan (*framing*) di dalamnya melalui sebuah medium baik tulisan, *video*, maupun foto pada media cetak, media elektronik, maupun media internet (*online*) merupakan satu strategi efektif dalam kaitannya dengan efek penangkalan tanpa terkecuali bagi aspek pertahanan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Pedrason, Rodon. Wawancara. 12-11-2018.

<sup>23</sup>Sunaryo. Wawancara. 27-9-2018.

<sup>24</sup>Swastanto, Yoedhi. Wawancara. 01-11-2018.

## **Penggunaan Foto Jurnalistik dalam Media Framing**

Foto jurnalistik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pemberitaan. Pemberitaan merupakan sebuah kesaksian yang disampaikan oleh pers kepada masyarakat, kesaksian itu adalah kesaksian saksi mata yang harus ditampilkan sebagaimana atmosfer yang dilihat, dimana foto jurnalistik dapat dikatakan satu kesaksian atau mata bagi dunia. Pemberitaan mempunyai sebuah dasar, namun pada hakikatnya jurnalistik berdasar kepada kehidupan. Kesaksian sebagaimana yang dilihat adalah foto jurnalistik.<sup>25</sup>

Gambar atau foto yang mewakili sebuah media tidak akan berbohong dan dapat menjadi kekuatan dari media yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat. *Framing* yang diberikan oleh pers visual merupakan sebuah kekuatan dari media massa yang mengandung kebenaran. Gambar selalu dapat menjadi sesuatu yang efektif sebagai cara untuk menyampaikan sebuah pesan, propaganda, ataupun tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh seorang pelaku media. Pers atau media massa tidak hanya semata-mata menyiarkan sebuah

pemberitaan, namun juga dapat menjadi suara maupun aspirasi melalui foto sebagai medium. Sebuah foto tidak hanya mewakili suatu berita, namun foto juga dapat berpihak secara subjektif sesuai pesan maupun tujuan yang ingin disampaikan sekaligus menjadi sebuah suara atau ajakan untuk melakukan sebuah tindakan perlawanan terhadap segala sesuatu yang dianggap tidak berjalan seperti yang seharusnya selama foto yang ditampilkan mengandung fakta.<sup>26</sup>

Implementasi foto jurnalistik penenggelaman kapal *illegal fishing* diwujudkan melalui keterlibatan media massa baik nasional dan internasional, yang dimaksudkan untuk menambah ruang lingkup dari penyebarannya mengenai tindakan penenggelaman kapal *illegal fishing* itu sendiri, dikarenakan keterkaitan dengan publik internasional dilihat dari pelaku *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF)* yang memang berasal dari luar Indonesia. Selain itu, implementasi dari foto jurnalistik juga dilakukan karena foto penenggelaman kapal penangkap ikan tanpa izin (*illegal fishing*) memiliki nilai yang tinggi, dan hingga saat ini tidak jarang media

---

<sup>25</sup>Motuloh, Oscar. Wawancara. 24-11-2018.

<sup>26</sup>Motuloh, Oscar. Wawancara. 24-11-2018.

internasional yang mempertanyakan jadwal dari kegiatan tersebut. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu bersifat terbuka baik dengan media nasional maupun internasional, dengan tujuan dan harapan agar penegakan hukum *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) ini dapat diketahui masyarakat dengan ruang lingkup global, yang berdampak pada penurunan dari angka *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) sendiri. Hal ini dapat dikatakan menjadi salah satu usaha untuk tetap menjaga ketersediaan dari sumber daya laut sekaligus menjaga kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

### **Pengaplikasian Media Framing dan Foto Jurnalistik sebagai Potensi untuk Mendukung Diplomasi Pertahanan**

Media massa pada hakikatnya memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan informasi atas sebuah kejadian maupun peristiwa kepada khalayak luas, dengan menghasilkan sebuah produk jurnalistik melalui medium yang terdiri dari media cetak, media elektronik, maupun media online. Pers adalah lembaga sosial dan

wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>28</sup>

Berbagai efek dapat dihasilkan sebuah foto jurnalistik yang memvisualisasikan sebuah fakta, dimana dalam hal ini efek pada foto jurnalistik itu sendiri dapat menjadi pesan yang ingin disampaikan melalui sebuah pemberitaan yang didukung oleh *framing* untuk dapat membantuk citra maupun stigma khalayak yang melihat guna mewujudkan efektifitas dari penggunaan sebuah foto jurnalisik dalam satu pemberitaan.

Hadirnya sebuah tindakan ataupun pergerakan yang dihasilkan setelah penyebaran sebuah pemberitaan yang tetap berdasarkan kepada fakta yang ada, dapat menjadi efek lain sebagai implementasi dari sebuah penggunaan foto jurnalistik dalam sebuah pemberitaan. Pada penegakan hukum *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*

---

<sup>27</sup>Safri, Regina. Wawancara. 18-12-2018.

<sup>28</sup>Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Kebebasan Pers*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2008, hal: 205.

(IUUF) yang berujung pada penenggelaman pada kapal yang melakukan *illegal fishing*, implementasi foto jurnalistik dilakukan melalui publikasi yang melibatkan baik pihak internal maupun pihak eksternal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu media massa untuk meningkatkan efektifitas foto penenggelaman kapal *illegal fishing* melalui penyebarannya kepada khalayak luas dari berbagai kalangan baik nasional maupun internasional.

Pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) pengaplikasian foto jurnalistik diwujudkan melalui foto-foto dari penenggelaman kapal *illegal fishing* dengan keterlibatan media massa baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan efektifitasnya. Ruang lingkup yang dimiliki oleh media massa dalam menyebarkan sebuah pemberitaan dapat menambah efektifitas untuk menyampaikan pesan yang dimiliki oleh pemberitaan itu sendiri, tanpa terkecuali pada penegakan hukum dari *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) yang digunakan sebagai salah satu strategi untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Implementasi Media Framing pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF)**

Konsep *media framing* digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penseleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media yang signifikan dalam masyarakat modern. Analisis *framing* mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai dengan perpektifnya.<sup>29</sup>

Melihat permasalahan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF), analisis *media framing* dibutuhkan untuk membentuk pandangan masyarakat baik dalam dan luar negeri untuk dapat memberikan gambaran akan dampak yang terjadi kepada para pelaku *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) dalam rangka melindungi ketersediaan sumber daya di wilayah laut Republik Indonesia. Menentukan medium apa yang dapat digunakan dalam analisis *framing* juga menjadi strategi lain yang dapat diterapkan guna mendapatkan hasil yang diinginkan dari penggunaan analisis *framing* ini sendiri. Meskipun dalam proses

---

<sup>29</sup>McQuail, Dennis. *Mass Communication Theories*, 4th Ed. London: Sage Publication. 2000. Hal : 66

publikasi mengenai *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki sebuah tim liputannya sendiri. Kekuatan yang dimiliki oleh media massa pada sebuah publikasi dapat mendukung efektifitas persebaran informasi mengenai satu isu maupun peristiwa kepada khalayak luas.

### **Analisis Semiotika pada Foto Jurnalistik Peneggelaman Kapal *Illegal Fishing***

Pada sebuah pemberitaan yang dilakukan oleh media massa, penggunaan medium berupa tulisan, foto, suara, dan gambar berjalan (*audio visual*) dapat mempengaruhi bagaimana efektifitas sebuah medium dari satu publikasi yang berdasarkan fakta atas suatu kejadian atau peristiwa tidak dipungkiri dipengaruhi oleh makna yang dapat ditafsirkan oleh khalayak luas melalui medium-medium dari publikasi itu sendiri, salah satunya melalui medium foto jurnalistik.

Analisis semiotika memiliki dua pesan, yaitu pesan denotasi yang merupakan perwakilan dari benda sesungguhnya dalam gambar yang memang merujuk kepada benda itu, persepsi dari realita dan gambar)itu

sendiri, serta pesan konotasi yaitu cara bagaimana khalayak pada batas tertentu mengkomunikasikan apa yang mereka pikirkan tentang pesan itu.<sup>30</sup>

Fotografi jurnalistik tidak selalu identik mengenai sebuah momentum, namun bagaimana kejelasan makna dari sebuah foto jurnalistik untuk dapat dipahami oleh mata khalayak dan menembus semua batas dari berbagai kalangan dapat menjadi efektifitas yang menjadi daya tarik terhadap penggunaan foto jurnalistik itu sendiri. Pemaknaan dalam fotografi hadir bersamaan dengan hasil dari fotografi jurnalistik tersebut, dimana pemaknaan dapat berwujud sebuah karakter yang dapat ditimbulkan oleh fotografer selaku eksekutor dalam proses pembuatan foto jurnalistik.

Pemaknaan yang terdapat di dalam fotografi pada hakikatnya hadir sejalan dengan hasil dari foto jurnalistik, yang dalam proses pembuatannya ketelitian dari seorang fotografer selaku eksekutor untuk dapat menyertakan simbol yang dilihat secara langsung, dimana berlangsungnya sebuah kejadian atau peristiwa untuk disampaikan sebagai satu kesaksian melalui foto jurnalistik merupakan unsur penting untuk

---

<sup>30</sup>Barthes, Roland. *Images, Music, Text*. Great Britain : Clays. 1977. Hal 21.

mewujudkan efektifitas dari publikasi foto jurnalistik itu sendiri. Pemaknaan di dalam foto jurnalistik tidak dipungkiri dapat dilihat bagaimana sebuah tema yang telah diarahkan melalui pemingkaiian pada sebuah pemberitaan, untuk kemudian dapat divisualisasikan ke dalam bentuk foto yang nantinya akan dipublikasikan kepada khalayak luas melalui peran dari media massa.

Perpaduan antara *framing* dengan ketelitian dari makna yang dapat diperlihatkan dalam sebuah kejadian maupun peristiwa oleh eksekutor, dan meramu kedua unsur tersebut menjadi suatu pesan melalui sebuah pemberitaan yang menggunakan berbagai medium, salah satunya foto jurnalistik, dapat menjadi sebuah kekuatan efektif untuk satu tujuan tanpa terkecuali pada aspek pertahanan.

**Gambar 2.** Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing*



Sumber: KKP, 2018

Data Visual	Data Non Verbal
Komposisi yang dihadirkan lebih mengedepankan momentum saat kapal diledakan yang merupakan proses dari penenggelaman kapal <i>illegal fishing</i> .	Momentum dari peledakan kapal dapat menunjukkan keseriusan dari pemerintah Indonesia dan lembaga terkait dalam menangani kasus <i>illegal fishing</i> .

**Gambar 3.** Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing*



Sumber: KKP, 2018

Data Visual	Data Non Verbal
Komposisi yang dihadirkan lebih mengedepankan momentum saat kapal diledakan yang merupakan proses dari penenggelaman kapal <i>illegal fishing</i> .	Momentum dari peledakan kapal dapat menunjukkan keseriusan dari pemerintah Indonesia dan lembaga terkait dalam menangani kasus <i>illegal fishing</i> .

**Gambar 4.** Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing*



Sumber: KKP, 2018

Data Visual	Data Non Verbal
Komposisi yang dihadirkan tidak hanya mengedepankan momentum saat kapal diledakan, namun juga bagaimana visualisasi kapal yang hancur menjadi fokus sebagai proses penenggelaman kapal <i>illegal fishing</i> .	Momentum dari peledakan kapal dapat menunjukkan keseriusan dan totalitas dari pemerintah Indonesia dan lembaga terkait, sekaligus menjadi simbol akan dampak yang akan dirasakan para pelaku <i>illegal fishing</i> .

**Gambar 5.** Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing*



Sumber: KKP, 2018

Data Visual	Data Non Verbal
Komposisi yang dihadirkan tidak hanya mengedepankan momentum saat kapal diledakan, namun juga bagaimana visualisasi kapal yang hancur menjadi fokus sebagai proses penenggelaman kapal <i>illegal fishing</i> .	Momentum dari peledakan kapal dapat menunjukkan keseriusan dan totalitas dari pemerintah Indonesia dan lembaga terkait, sekaligus menjadi simbol akan dampak yang akan dirasakan para pelaku <i>illegal fishing</i> .

Efektifitas dari penggunaan sebuah foto jurnalistik erat kaitannya dengan pemaknaan atau semiotika yang terkandung di dalam foto jurnalistik itu sendiri, yang terwujud melalui kesamaan dalam pembacaan persepsi oleh mata khalayak luas yang melihat foto tersebut. Perbedaan tafsir tentang bagaimana makna ataupun pesan pada sebuah foto jurnalistik terlihat pada umumnya merupakan hal yang biasa terjadi dikarenakan perbedaan pada sudut pandang mengenai suatu hal merupakan karakter yang ada secara lahiriah dalam manusia.

Pada foto jurnalistik penenggelaman kapal *illegal fishing*, bagaimana analisa semiotika atau pemaknaan dari foto itu sendiri dapat diwujudkan melalui momentum dimana sebuah kapal penenggelaman kapal *illegal fishing* tersebut meledak, dan perlahan

tenggelam sebagai komposisi untuk ditampilkan pada gambaran visual pada foto. Pada gambar 2 serta gambar 3, dapat dilihat bahwa terdapat satu perbedaan signifikan dari kedua foto tersebut. Perbedaan komposisi dari kedua kapal yang diledakkan terlihat bahwa kapal meledak dengan visual kapal yang masih ada di permukaan air, sedangkan pada gambar 4 dan gambar 5 terlihat kapal-kapal yang meledak serta hancur, dan adanya kepulan asap dengan kondisi kapal yang hampir tenggelam secara keseluruhan, sebagai bukti momentum peledakan kapal di dalam foto tersebut. Penenggelaman kapal pada akhirnya dapat menggambarkan proses yang dimulai sejak kapal penenggelaman kapal *illegal fishing* tersebut diledakkan hingga akhirnya tenggelam dapat divisualisasikan dan dikombinasikan sebagai satu visual pada sebuah foto jurnalistik merupakan strategi yang harus dilakukan seorang fotografer sebagai eksekutor guna mewujudkan efektifitas dalam penyampaian makna maupun pesan pada publikasi sebuah foto jurnalistik penenggelaman kapal *illegal fishing* melalui media massa.

Tingkat Pertandaan	Foto Jurnalistik Penenggelaman Kapal <i>Illegal Fishing</i>
Denotasi	Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pemangku kepentingan, dan TNI Angkatan Laut sebagai eksekutor akan menenggelamkan kapal asing yang melakukan <i>illegal fishing</i> menggunakan alat peledak.
Konotasi	Setiap kapal <i>illegal fishing</i> yang ditenggelamkan akan hancur dan tidak dapat digunakan lagi oleh pelaku <i>illegal fishing</i> , sehingga diharapkan adanya penenggelaman kapal diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pihak yang akan melakukan <i>illegal fishing</i> di wilayah laut Indonesia.

### **Hubungan Media Framing dan Foto Jurnalistik Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* sebagai Potensi Mendukung Diplomasi Pertahanan**

Pada hakikatnya definisi *framing* merupakan proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ia juga menyatakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga tertentu

mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya.<sup>31</sup>

Penggunaan *Media framing* merupakan penyeleksian terhadap sebuah fenomena yang difokuskan kepada fenomena dari penenggelaman kapal *illegal fishing*, dengan penggunaan foto jurnalistik dari penenggelaman kapal tersebut sebagai instrumen untuk menjadi daya tangkal (*deterrence*) yang menyebabkan penurunan terhadap *illegal fishing* itu sendiri.

Foto jurnalistik adalah bagian dari dunia jurnalistik yang menggunakan bahasa visual untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas dan tetap terikat kode etik jurnalistik. Ada etika yang selalu dijunjung tinggi, ada pesan dan berita yang ingin disampaikan, ada batasan yang tidak boleh dilanggar, dan ada momentum yang harus ditampilkan dalam sebuah *frame*, melalui nilai-nilai kejujuran yang selalu didasarkan pada fakta obyektif semata.<sup>32</sup>

Secara umum foto jurnalistik merupakan gambar yang dihasilkan lewat proses fotografi untuk menyampaikan suatu pesan, informasi, cerita suatu peristiwa yang menarik bagi publik dan disebarluaskan melalui media massa.<sup>33</sup>

Penggunaan fotografi sebagai media untuk merekam atau mendokumentasikan penenggelaman kapal penangkap *illegal fishing* di kawasan laut Indonesia dapat dikatakan penting dikarenakan adanya foto dalam kebijakan penenggelaman kapal yang dipublikasikan baik dalam ruang lingkup nasional dan internasional secara tidak langsung dapat menjadi gambaran bagi para pelaku penangkapan ikan *illegal fishing* tentang dampak apa yang akan terjadi apabila melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan laut Indonesia.

### **Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF)***

Hingga saat ini pertahanan menjadi salah satu aspek penting yang harus untuk menjaga kelangsungan dan stabilitas sebuah negara dengan menggunakan berbagai instrumen, salah satunya dengan diplomasi. Diplomasi pertahanan dapat dikatakan sebagai penggunaan tindakan non-kekerasan dari aparat pertahanan negara untuk memajukan tujuan strategis pemerintah melalui kerjasama dengan negara lain. Dalam istilah praktis, tujuan

---

<sup>31</sup>Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, Hal 67-68.

<sup>32</sup><https://www.antarafoto.com/artikel/v1292720196/sebuah-definisi-foto-jurnalistik>.

<sup>33</sup>Ibid., 28.

semacam itu dapat melibatkan kontribusi untuk pencegahan dan penyelesaian konflik.<sup>34</sup>

Diplomasi pertahanan juga dapat diidentifikasi sebagai pekerjaan tanpa paksaan, dalam masa damai dari sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan nasional tertentu, terutama melalui hubungan dengan negara atau pihak lain.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya diplomasi pertahanan dapat digunakan untuk memajukan tujuan strategis pemerintah yang dapat melibatkan kontribusi untuk pencegahan dan penyelesaian konflik, melalui keterlibatan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan nasional tertentu, terutama melalui hubungan dengan negara lain.

Diplomasi pertahanan pada penegakan hukum *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) dilakukan saat terdapat sebuah kapal yang berasal dari luar Indonesia, dan dicurigai melakukan *illegal fishing*. Dikarenakan para pelaku yang berasal dari luar Indonesia, maka diplomasi merupakan salah satu langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

permasalahan dari penangkapan ikan *illegal fishing* dari TNI Angkatan Laut sebagai pelaksana dari penegakan hukum pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) di Indonesia. Melalui Kementerian Luar Negeri yang menjembatani proses diplomasi dengan negara asal dari kapal yang melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF), TNI Angkatan Laut memberikan pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran yang dilakukan untuk mendapat persetujuan sekaligus kesepakatan terkait tindakan selanjutnya yang diambil oleh TNI Angkatan Laut untuk selanjutnya dapat melakukan penenggelaman pada kapal penangkap ikan tanpa izin (*illegal fishing*).

### **Efek Penangkalan (*Deterrence Effect*) melalui Keterkaitan *Media Framing* dengan Foto Jurnalistik pada IUUF**

Pada implementasinya, daya tangkal (*deterrence*) dapat digunakan sebagai sebuah strategi pertahanan negara dengan tujuan untuk mencegah masuknya berbagai ancaman yang dapat

---

<sup>34</sup>Winger, Gregory. 2014. *The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy*. Paper presented at the What Do Ideas Do?: Junior Visiting Fellows' Conferences, Vienna.

<sup>35</sup>Cheyre, Juan Emilio. 2013. "Defence Diplomacy." In *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, edited by Andrew Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur, 369–382. Oxford: Oxford University Press.

mengganggu keamanan dan kestabilan negara tersebut.

Strategi pertahanan negara pada dasarnya terdiri dari tiga tipe yang dibentuk berdasarkan tujuannya, yaitu defensif, penangkalan, ataupun penindakan. Efek penangkalan (*deterrence effect*) awalnya muncul sebagai perkembangan strategi militer, yaitu konsep pertahanan (*defense*) dan penyerangan (*offense*). Penangkalan bersifat psikologis dan berfungsi sebelum perang terjadi. Efek penangkalan berfungsi untuk membuat musuh tidak melakukan gerakan yang memulai perang.<sup>36</sup>

Efek penangkalan bersifat psikologis berfungsi untuk mencegah pihak yang diduga dapat memunculkan sebuah ancaman tanpa menggunakan kekuatan militer. Penggunaan berbagai instrumen yang dapat menjadi kekuatan bersifat psikologis sendiri dapat menunjang efektifitas dari efek penangkalan layaknya pada penegakan hukum dari *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) yang diwujudkan melalui kegiatan penenggelaman kapal *illegal fishing* melalui keterlibatan berbagai instrumen untuk mewujudkan efektifitas dari

kebijakan tersebut tanpa terkecuali melalui keterlibatan media massa.

Sinergitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan para pelaku media untuk mempublikasikan kebijakan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) dalam bentuk penenggelaman kapal pada ruang lingkup nasional dan internasional yang secara tidak langsung berdampak kepada penurunan angka *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF). Dalam hal ini, fungsi sebuah foto jurnalistik untuk dapat menghadirkan satu bentuk visual dengan makna yang dimiliki tidak lepas sebagai bagian dari publikasi dalam sinergitas antara sebuah institusi pemerintahan dengan pelaku media seperti yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung kebijakan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF).

Penggunaan *media framing* yang didukung oleh kekuatan sebuah foto jurnalistik menjadi efektifitas sebuah publikasi yang digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya adalah publikasi tentang penenggelaman kapal *illegal fishing*. Hal ini dikarenakan adanya publikasi dari penenggelaman kapal ini

---

<sup>36</sup><http://ina.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/Kaji%20Ulang%20Pertahanan%20Negara%20-%20Andi%20Widjajanto.pdf>.

Diakses pada : 09 September 2018.

secara tidak langsung dapat menggambarkan dampak yang akan terjadi oleh para pelaku yang tetap menjalankan *illegal fishing*. Pentingnya sinergitas antara lembaga-lembaga pemerintahan dengan media massa dalam memajukan berbagai aspek pada pemerintahan itu sendiri tanpa terkecuali pada aspek pertahanan. Peran media massa untuk melakukan publikasi terhadap sebuah kejadian atau peristiwa termasuk dengan program kerja maupun kebijakan yang tengah dicanangkan ataupun dijalankan oleh sebuah lembaga pemerintahan dapat menjadi saluran efektif untuk mendukung keberhasilan dari program kerja atau kebijakan itu sendiri. Berbagai medium yang dimiliki oleh media massa diantaranya tulisan, *audio*, visual, maupun *audio visual* merupakan medium dengan berbagai karakteristik namun tetap memiliki efektifitas untuk menyampaikan sebuah pesan termasuk pada efek penangkalan. Pada penegakan hukum dari *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF), bentuk visual yang ditampilkan melalui sebuah foto jurnalistik penenggelaman kapal *illegal fishing* yang berdampak pada penurunan dari *illegal fishing* itu sendiri secara tidak langsung dapat menjadi sebuah bukti dari implementasi terhadap

sinergitas antara sebuah lembaga pemerintahan dengan media massa untuk dapat menghadirkan efek penangkalan (*deterrence effect*) sebagai sebuah strategi pada aspek pertahanan.

### **Penurunan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) sebagai Efek Behavioral dari Implementasi *Media Framing***

Adanya peningkatan pada sektor perikanan dalam hal ketersediaan ikan, pola konsumsi masyarakat, serta trend pertumbuhan ekonomi yang juga meningkat secara tidak langsung merupakan dampak positif sejak dijalkannya penegakkan hukum pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF). Pengembalian fungsi sumber daya di wilayah Indonesia merupakan salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah aturan untuk melindungi potensi dan kekayaan alam dari ancaman pihak-pihak yang ingin mengambil potensi serta kekayaan alam tersebut tanpa izin, merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan tidak hanya pada sektor perikanan saja, namun juga sektor lainnya guna menjaga kelangsungan sumber daya alam.

### Gambar 6. Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan dalam Penegakan Hukum Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) 2014-2018

Penenggelaman Kapal dimandatkan dalam UU Perikanan  
Melaksanakan penegakan kedaulatan laut yang tegas dan mendapatkan Deterrent Effect agar tidak ada lagi IUUF di wilayah perairan Indonesia

Pasal 69 UU Perikanan (11/2004 jo. 45/2009)

- Pasal 69 (2). Menghentikan, menarik, menawan, dan menawan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di Wilayah Pengelolaan Perikanan.
- Pasal 69 (4). Berdasarakan bukti permulaan yang cukup, dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.



Kapal ilegal yang ditenggelamkan, November 2014- Agustus 2018

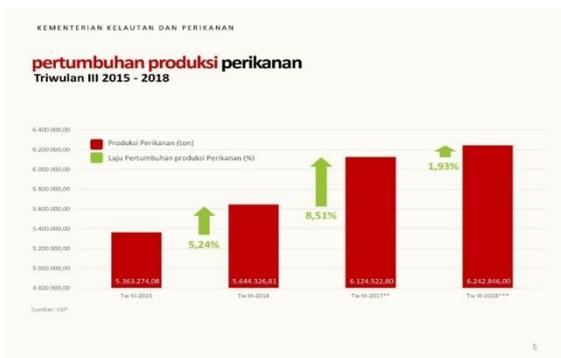
NO.	BENDERA KAPAL	TOTAL
1	Vietnam	276
2	Filipina	90
3	Thailand	50
4	Malaysia	41
5	Indonesia	26
6	Papua Nugini	2
7	China	1
8	Belize	1
9	Tanpa Negara	1
TOTAL		488 KAPAL

Kementerian Kelautan & Perikanan Republik Indonesia



Sumber: KKP, 2018

### Gambar 7. Pertumbuhan Produksi Perikanan 2014-2018



Sumber: KKP, 2018

Berdasarkan gambar 6 diatas, dapat dilihat bahwa dalam perjalanannya penegakan hukum pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) telah menenggelamkan 488 kapal dari berbagai negara, dengan mayoritas kapal yang memiliki bendera dari kawasan ASEAN. Sedangkan pada gambar 7, dapat dilihat bahwa terjadinya pertumbuhan produksi pada sektor perikanan memiliki relevansi sejak diberlakukannya penenggelaman kapal *illegal fishing*, yang

secara tidak langsung menjadi dampak adanya efek perilaku atau behavioral dari *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) di Indonesia. Banyaknya kapal yang telah ditangkap sesuai dengan tabel diatas secara tidak langsung linier dengan peningkatan ketersediaan stok ikan, pola konsumsi masyarakat, serta trend pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan Indonesia.

Hadirnya satu kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh sebuah lembaga pemerintahan dalam sebuah negara tidak dipungkiri haruslah ditunjang oleh beberapa instrumen yang mempengaruhi sekaligus meningkatkan efektifitas dari kebijakan itu sendiri. Masyarakat sebagai salah satu komponen utama dalam sebuah negara merupakan salah satu sasaran dari sebuah kebijakan sebagai pelaksana untuk ataupun pemerhati dari bagaimana kebijakan tersebut berjalan. Media massa sebagai instrumen dalam sebuah negara dengan tugas dan fungsi untuk menyebarkan sebuah peristiwa atau informasi, termasuk program maupun sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan pada ruang lingkup masyarakat dapat dikatakan menjadi medium yang efektif untuk mendukung keberhasilan dari kebijakan itu sendiri.

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan ini melalui medianya baik media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Tetapi, tugas dan fungsi pers yang bertanggung jawab tidaklah hanya sekadar itu, melainkan lebih dalam lagi yaitu mengamankan hak-hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya.<sup>37</sup>

Media massa memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan berita berupa informasi yang ditujukan kepada khalayak luas, dan memiliki berbagai fungsi dengan beberapa diantara fungsi tersebut berkaitan dengan sosialisasi satu kebijakan yang dibuat oleh sebuah lembaga pemerintahan. Penyeleksian serta pemingkalian (*framing*) dengan menitikberatkan satu sudut pandang yang dijadikan sebuah pemberitaan disamping gambaran umum terhadap isu ataupun peristiwa itu sendiri juga merupakan bagian dari kegiatan jurnalistik, dimana dalam media massa hal ini dapat disebut sebagai *media framing*.

*Media framing* dapat digunakan sebagai strategi dari bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan

kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan dan presentasi aspek tertentu dari realitas.<sup>38</sup>

Penenggelaman kapal *illegal fishing* diketahui memberikan dampak berupa penurunan angka *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF), yang dalam prosesnya juga menggunakan strategi lain untuk menunjang efektifitas dari tindakan penenggelaman kapal *illegal fishing* salah satunya melalui publikasi menggunakan media massa. Publikasi menggunakan *media framing* yang divisualisasikan menggunakan foto jurnalistik sebagai medium secara tidak langsung menjadi efektifitas yang dapat memberikan efek jera melalui gambaran dari efek yang akan terjadi kepada para pihak yang akan melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF), hingga berdampak kepada penurunan dari angka *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) itu sendiri.

---

<sup>37</sup>Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung :Remaja Rosdakarya, 2009. hal: 27.

<sup>38</sup>Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Hal 67-68.

## Kesimpulan

Pengaplikasian *media framing* dan foto jurnalistik sebagai *soft power diplomacy* pada praktiknya dapat menghasilkan efek penangkalan (*deterrence effect*), yang dapat menjadi potensi untuk mendukung diplomasi pertahanan. Hal ini dapat menjadi sebuah langkah efektif, yang dapat dikaitkan dengan diplomasi sebagai salah satu strategi pada pertahanan negara. Negosiasi yang terjadi antara pemerintahan Indonesia yang diwakilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan aktor-aktor yang melakukan *illegal fishing*, merupakan proses diplomasi yang berujung pada penenggelaman kapal *illegal fishing*.

Keterkaitan antara pengaplikasian *media framing* dengan foto jurnalistik penenggelaman kapal *illegal fishing* yang telah melewati diplomasi sebelumnya, menghasilkan efek penangkalan (*deterrence effect*) yang merupakan tujuan diplomasi pertahanan untuk menurunkan *illegal fishing* di wilayah laut Republik Indonesia.

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian mengenai potensi *media framing* mendukung diplomasi

pertahanan, dengan studi kasus foto jurnalistik penenggelaman kapal *illegal fishing* di Batam, tahun 2017, maka peneliti merekomendasikan bahwa pada praktiknya *media framing* dan foto jurnalistik tidak hanya digunakan untuk memperkuat sebuah pemberitaan, namun juga dapat dipergunakan sebagai instrumen dalam diplomasi pertahanan yang disesuaikan dengan konteks dari isu dan tujuan penggunaan *media framing* dan foto jurnalistik itu sendiri. Oleh karena itu, perlunya pengaplikasian *media framing* dan foto jurnalistik pada bidang lain dapat menjadi tolak ukur untuk melihat potensi lainnya yang dimiliki oleh *media framing* dan foto jurnalistik.

Diperlukannya sinergitas antara pelaku media massa dan lembaga-lembaga pemerintahan, secara tidak langsung dapat menunjang potensi serta efektifitas dari penggunaan *media framing* dan foto jurnalistik sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sebagai strategi pertahanan negara.

## Daftar Pustaka

### Buku

Alex Sobur. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. Hal: 162.

Barthes, Roland. *Images, Music, Text*. Great Britain: Clays. 1977. Hal 21.

Cottey, Andrew and Foster Anthony. *Reshapping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. London: Routledge. 2004. Hal: 6.

Cheyre, Juan Emilio. 2013. "Defence Diplomacy." In *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*, edited by Andrew Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur, 369–382. Oxford: Oxford University Press.

Eriyanto, Analisis *Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Hal 67.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009. hal: 27.

Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Kebebasan Pers*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008, hal: 205.

McQuail, Dennis. *Mass Communication Theories*, 4th Ed. London: Sage Publication. 2000. Hal: 66.

Wibisono, Makarim. *Tantangan Diplomasi Multilateral*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2006. Hal: 57.

<https://www.antarafoto.com/artikel/v1292720196/sebuah-definisi-foto-jurnalistik>.

### Sumber lain

Kuliah umum di Universitas Pertahanan oleh Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, pada tanggal 13 Maret 2018.

### Jurnal

T. Rid. *War and Media Operations : The US Military and the Press from Vietnam to Iraq*. London: Routledge. 2007. Hal: 229.

### Website

<http://ina.propatria.or.id/download/Paper%20Diskusi/Kaji%20Ulang%20Pertahanan%20Negara%20%20Andi%20Widjajanto.pdf>. Diakses pada: 09 September 2018.

